

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH ANGGOTA DPRD DALAM PEMILU LEGISLATIF (Studi di Kabupaten Probolinggo)

Winda Wahyu Ningtyas¹ H. Abd Wahid² Diyan Isnaeni³

Fakultas Hukum

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang

Email: wtyas25@gmail.com

ABSTRACT

A diploma is a proof that a certain level of education has been completed. A diploma is a valuable item and is used to determine the level of education of a person, and is used to qualify for job applications. The Regional People's Representative Council (DPRD) is a people's representative institution elected by the people. In order to be elected, it must register itself and one of the conditions is the last certificate. In practice, there are problems that occur when registering to the election, one of which is the use of fake diplomas. Departing from these problems, the formulation of the problem in this study is how the accountability, impact and sanctions on the use of certificate forgery by the Regional People's Representative Council in the election. The research method used is juridical empirical. From the results of the study, it was concluded that criminal liability was imposed if it fulfilled the elements in the article concerning certificate forgery, the impact was divided into internal and external impacts, and the sanction of certificate forgery in accordance with the Criminal Code.

Keywords: forgery, diploma, DPRD

ABSTRAK

Ijazah merupakan tanda bukti telah diselesaikannya suatu tingkat pendidikan. Ijazah merupakan barang yang berharga dan digunakan untuk mengetahui sampai tingkat mana pendidikan seseorang, dan digunakan untuk persyaratan melamar pekerjaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat, untuk dapat dipilih, ia harus mendaftarkan dirinya dan salah satu syaratnya adalah ijazah terakhir. Di dalam praktiknya terdapat permasalahan yang terjadi saat hendak mendaftar hingga pemilihan, salah satunya ialah penggunaan ijazah palsu. Berangkat dari permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertanggungjawaban, dampak dan sanksi penggunaan pemalsuan ijazah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilu. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana dijatuhkan apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal mengenai pemalsuan ijazah, dampak terbagi menjadi dampak internal dan eksternal, dan sanksi pemalsuan ijazah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci: Pemalsuan, ijazah, DPRD

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini.⁴ Indonesia adalah negara hukum, dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang salah satu ciri utamanya adalah penilaian perilaku. Hukum dianggap sebagai alat untuk memberikan kesetaraan dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah utama dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada beberapa faktor, yaitu faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada kandungan faktor-faktor tersebut, Lima faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor hukum itu sendiri terbatas pada peraturan perundang-undangan;
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu para pihak yang merupakan atau pelaksana hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu hukum yang berlaku atau lingkungan hukum yang berlaku;
- d. Faktor budaya, yaitu karena pekerjaan, kreativitas Dan hasil dari rasa berdasarkan inisiatif manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan guru dan siswa, tetapi juga institusi yang membayangi pendidikan dan pemerintahan. Ijazah adalah ijazah penyelesaian studi, surat yang menyatakan Seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari tingkat pengetahuan atau kursus tertentu Dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Ijazah digunakan seseorang untuk melamar pekerjaan dan melihat sampai tingkat mana seseorang menyelesaikan pendidikannya. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan yang memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dikonotasikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan demikian dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara.⁶

⁴ Abdul Wahid, Sunardi, *Doktrin Khilafah Sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Unisma Malang, Vol I No. 2, Juni 2018, h.210

⁵ A.A. Oka Mahendra. (2010). *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*. djpp.depkmham.go.id. Jakarta

⁶ Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Unisma Malang, Vol. XIX No. 36, Februari-Mei 2013, h.136

Ijazah merupakan persyaratan yang diperlukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Hal ini membuat terdapat beberapa oknum yang membuat ijazah palsu untuk digunakan memenuhi syarat tersebut. Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna ijazah palsu oleh DPR dalam Pemilu Legislatif di wilayah Polres Probolinggo, bagaimana dampak pemalsuan ijazah oleh anggota DPRD dalam pemilu legislatif di wilayah Polres Probolinggo, bagaimana sanksi pidana pemalsuan ijazah dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tujuan dari penulisan ini adalah ingin memaparkan dan mengetahui lebih jelas sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna ijazah palsu oleh DPR dalam Pemilu Legislatif di wilayah Polres Probolinggo, untuk mengetahui dampak pemalsuan ijazah oleh anggota DPRD dalam pemilu legislatif di wilayah Polres Probolinggo, untuk mengetahui sanksi pidana pemalsuan ijazah dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis empiris, yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷ Penulis menggunakan pendekatan sosiologis untuk memperoleh data dalam lapangan dan mengkaji permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat yang akan dikaitkan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang akan di teliti oleh penulis.

PEMBAHASAN

Dampak yang Menjadikan Anggota Calon Anggota DPRD Melakukan Pemalsuan Ijazah dalam Pemilu Legislatif

Setiap warga negara memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, namun hak tersebut dibatasi dengan beberapa peraturan-peraturan diantaranya yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

⁷ Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 16

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat pada Pasal 51 terdiri dari 16 huruf, sebagian diantaranya:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat:

Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa calon anggota DPRD setidak-tidaknya berumur 21 (dua puluh satu) tahun, umur 21 (dua puluh satu) tahun dianggap sebagai orang cakap hukum dan dapat menentukan baik dan buruk. Artinya orang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dianggap telah mengerti norma-norma yang hidup di masyarakat sekalipun itu yang mengandung nilai kebaikan atau melanggar undang-undang. Sedangkan landasan kuat dalam yuridis juga termaktub dalam Pasal 330 KUH perdata yang menyebutkan bahwa, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tak lebih dahulu telah kawin.” Artinya, bahwa kedewasaan seseorang dikaitkan dengan kecakapan melalui tindakan hukum maka pembuat undang-undang (BW) berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat secara sadar mengerti dan menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum. karena “anggapan” tidak selalu sesuai dengan kenyataan maka ketentuan usia dewasa bisa tidak sesuai dengan realitanya. Bisa saja ada di antara mereka yang sudah berusia 21 tahun masih tetap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum dapat secara umum mengukur akibat hukum dari tindakannya. Namun demikian, kepastian hukum agar tidak ada keraguan-keraguan mengenai

kecapakan bertindak seseorang maka ditetapkan saja ukuran 21 tahun oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁸

Yang menarik ialah point dalam huruf E, perihal kewajiban untuk memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas, hal ini tentunya dinyatakan sebagai syarat mutlak bagi setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Meski hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan wajah demokrasi murni yakni “setiap warga negara berhak atas dipilih dan memilih”, namun hal ini merupakan solusi untuk mendapatkan para wakil-wakil rakyat yang berintegritas dengan melihat dari tolak ukur paling bawah yakni pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Dari sekian banyak warga negara yang ikut terlibat mencalonkan diri sebagai Calon DPRD, terdapat kemungkinan bahwa sebagi calon melakukan pemalsuan terhadap ijazah, hal ini dilakukan untuk agar supaya dapat memenuhi persyaratan mencalonkan sebagai anggota DPRD. Jelas dalam ilmu kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan menyebutkan bahwa terlebih dahulu diselidiki tujuan perbuatan tersebut dilakukan, apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat demikian, apakah memang bakatnya adalah jahat, ataukah di dorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis.

Calon anggota DPRD yang nekat untuk melakukan kejahatan demi lolos memenuhi persyaratan, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan pemalsuan, dan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu pertama kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Kedua ketertiban

⁸ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, (2010), *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, Nasional Legal Reform Program Jakarta, h. 10.

masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.⁹

Dalam yang terbukti bersalah menggunakan ijazah palsu untuk kepentingan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD berinisial AK, dalam sidang di PN Kraksaan memvonisnya dengan hukuman penjara 1 Tahun 4 Bulan, yang terbukti dalam persidangan bahwa telah menggunakan ijazah palsu yang terbukti bahwa tandatangan dalam ijazah tersebut Non Identik atau Palsu. Hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”

Motif pelaku yang semulanya hanya berprofesi sebagai pedagang menginginkan menjadi anggota DPRD yang secara kebetulan mampu secara finansial dan mendapatkan tawaran didukung oleh partai tertentu, motif inilah yang mengawali niat pelaku untuk melakukan pemalsuan ijazah. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kejahatan tindak pidana pemalsuan surat/ijazah terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri seseorang atau faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang baik atau buruk, penulis merangkum beberapa faktor internal yakni diantaranya:

a. Faktor strata sosial

Strata sosial merupakan penyebab utama pemicu tindak kejahatan, sebab strata sosial membuat para pelaku kejahatan merasa terdorong karena pengakuan lingkungan. Dan gengsi yang terdapat dalam diri seseorang yang terkadang akan merasa lebih dihormati, dihargai dengan gelar yang disandangnya.

⁹ Junaedi Efendi, (2016), *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta; Prenamedia Group, h. 301.

b. Untuk memenuhi Perekonomian dan Jabatannya

Kenaikan jabatan berhubungan langsung dengan perekonomian, maraknya terjadinya pemalsuan ijazah disebabkan setiap pelaku kejahatan berpikir secara sederhana bahwa menggunakan ijazah palsu dapat menaikkan jabatan yang berujung pada naiknya penghasilan.

c. Pemahaman agama yang kurang

Faktor religius merupakan sebab penting dalam diri seseorang yakni rendahnya moral yang ada sehingga dapat terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak moral pada diri sendiri dan tidak adanya kesadaran diri untuk belajar dan meraih suatu prestasi dalam suatu pendidikan untuk mencapai hasil/gelar yang diinginkannya dengan kemampuan dirinya sendiri.

Terdapat dari faktor eksternal diantaranya yang dapat mempengaruhi tindak pidana tersebut terjadi diantaranya:

a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dampak negatif yang ditimbulkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan kemauan ilmu teknologi maka, setiap hal yang menyangkut surat atau dokumen dapat dengan mudah untuk ditiru.

b. Adanya peluang atau kesempatan

Kejahatan karena melihat adanya peluang kesempatan yang ada. Dalam hal pemalsuan ijazah seorang pelaku pemalsuan ijazah tersebut melihat adanya kelemahan-kelemahan dari peraturan-peraturan hukumnya itu sendiri serta sikap tidak peduli atau kurangnya kontrol dari masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kasus pemalsuan ini, sehingga dianggap sebagai suatu peluang atau

kesempatan bagi pihak-pihak yang hanya mencaari keuntungan belaka dengan memanfaatkan kondisi demikian guna memenuhi kebutuhan dari pihak lainnya dalam hal penggunaan ijazah.

c. Adanya rekrutmen instansi tertentu

Pengumuman penerimaan untuk memenuhi jabatan atau posisi tertentu, mengandung berbagai kriteria dan dibatasi oleh waktu. Beberapa persyaratan tersebut , justru merupakan dorongan atau pemicu bagi seseorang karena bila diterima dalam proses rekrutmen tersebut. harapannya akan memberikan kontribusi positif bagi dirinya.

Dampak yang ditimbulkan akibat kasus pemalsuan ijazah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penulis membagi dua faktor yakni faktor eksternal dan faktor internal. Dampak yang timbul akibat penggunaan ijazah palsu oleh calon anggota DPRD diantaranya itu:

1. Di kalangan masyarakat

Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan dengan adanya pemalsuan ijazah. Lembaga pendidikan yang awalnya melaksanakan perintah undang-undang sebagai wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kejadian kasus tindak pidana kejahatan pemalsuan seperti ini maka kepercayaan terhadap lembaga pendidikan menurun, dan partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan berkurang.

2. Sekolah yang dipalsukan

Sekolah yang dipalsukan akan memiliki citra yang buruk di tengah masyarakat karena akan diduga telah menerbitkan ijazah palsu. Dan mungkin hukuman yang dapat diberikan terhadap sekolah tersebut yakni penutupan dan pemidanaan bagi pejabat yang bertanggungjawab.

3. Segi finansial

Kerugian lainnya yang dapat ditimbulkan dalam pemalsuan ijazah yakni akan terjadi manipulasi data, dan korupsi atau memanfaatkan jabatan demi kepentingannya sendiri, sebab hal ini sering terjadi karena oknum calon DPRD memiliki niat yang terselubung.

Sedangkan dampak internal yang timbul akibat pemalsuan ijazah ini bagi pelaku sendiri yakni terdapat beberapa faktor diantaranya, sebagai berikut:

1. Diberhentikan dari jabatannya

Konsekuensi logis yang diterima oleh oknum pelaku yakni diberhentikan dari anggota DPRD jika terbukti memalsukan ijazahnya, karena dianggap tidak memenuhi syarat formil yakni tidak memiliki ijazah atau bukan merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas.

2. Mendapatkan stigma buruk dari masyarakat

Pelaku akan menerima stigma buruk masyarakat karena hal ini sangat melukai hati masyarakat khususnya warga yang mendapatkan hak pilih bahwa jalannya pemilihan umum yang mengutamakan jujur adil telah dikotori dengan adanya pemalsuan ijazah oleh oknum calon.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu oleh DPR dalam Pemilu Legislatif

Dalam hukum pidana dikenal dengan pertanggungjawaban pidana, atau dikenal dengan *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana bukan hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi rasa keadilan.¹⁰

Yang menjadi point utama adalah unsur kesalahan dari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diartikan bahwa perbuatan tindak pidana tidak dapat dikatakan bersalah karena melawan hukum atau dilarang oleh hukum sebab harus dibuktikan kadar unsur kesalahan atau tidak. Sedangkan unsur kesalahan merupakan *mens rea* dari pelaku yang diartikan melanggar peraturan perundang-undangan. Maka kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain.

Pasal 520 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR,

¹⁰ Hanafi, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 16.

DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling Banyak Rp. 72. 000.000 (Tujuh puluh Dua Juta rupiah)”

Untuk membedah tentang pertanggungjawaban pidana, maka juga haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur satu persatu, yang pertama adalah Setiap orang, adalah menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, secara spesifik kata setiap orang merujuk pada setiap kontestan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang akan mengikuti atau telah mengikuti kontestasi pemilihan umum. Dengan demikian jelas bahwa maksud dari setiap orang dari Pasal tersebut diatas, adalah para bakal calon/ calon anggota DPRD.

Yang kedua adalah unsur Kesengajaan, dalam hukum pidana umumnya di Indonesia dikenal unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat jahat. Maka yang perlu diurai dalam unsur kesengajaan ini adalah fakta-fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pemalsuan. Unsur membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota. Secara eksplisit disebutkan bahwa hal yang dilarang adalah memakai, atau menyuruh dan sengaja memakai. secara mendasar terdapat perbedaan yakni orang yang menyuruh atau yang disebut dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dibagi kedalam dua kelompok yakni :

1. Melakukan (*Pleger*)
2. Menyuruh Melakukan (*doenpleger*)
3. Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)
4. Sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Sedangkan disebut sebagai pembantu yakni mereka yang, Membantu pada saat kejahatan dilakukan dan membantu sebelum kejahatan dilakukan. Dalam sengaja memakai yang dimaksud dalam Pasal diatas ialah kesengajaan sebagai suatu keharusan Kesangajan

semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.¹¹

Jika dikaitkan dengan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh calon anggota DPRD, dimana pelaku tidak menghendaki adanya sangkaan atau dugaan tentang perbuatannya yang melanggar hukum, melainkan maksud tujuannya yang dia lakukan semata-mata untuk mencapai tujuan yang lain, yakni menjadi calon anggota DPRD dengan cara yang dilarang oleh undang-undang.

Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mengatur secara tegas tentang pemalsuan, yakni diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dari Pasa 263 sampai Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 Macam kejahatan pemalsuan, yakni:.¹²

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat diperberat (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Oleh sebab terdapat Pasal yang tidak sesuai dengan topik penelitian, maka penulis akan menjabarkan Pasal yang relevan dengan topik penelitian diantaranya:

1. Pemalsuan Surat Pada umumnya (Pasal 263)

¹¹ Frans Maramis, (2012), *Hukum Pidana Uum dan Tertulis di Indonesa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 85.

¹² H.A.K Moch Anwar, (1986), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Jakarta; Alumni, h. 190.

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHPidana, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, diantaranya dirumuskan pada ayat 1 dan 2, rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

A. Unsur obyektifnya.

1. Perbuatan
 - a. Membuat palsu
 - b. Memalsu obyeknya
2. Obyeknya
 - a. Yang dapat menimbulkan hak
 - b. Yang menimbulkan suatu perikatan
 - c. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
 - d. Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
3. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

B. Unsur Subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.¹³

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur obyektif
 - a. Perbuatan : memakai
 - b. Obyeknya
 - Surat palsu

¹³ Adami Chazawi, (2001), *Kejahatan Terhadap Pemalsuan Jakarta* ; Raja Grafindo Persada, h. 3.

- Surat yang dipalsukan

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

2. Unsur subyektif : dengan sengaja

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang teridiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau maka tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.¹⁴

Membuat surat palsu (membuat palsu *valselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, dan palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁵ Membuat surat palsu ini dapat berupa:¹⁶

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valscheid*) palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Pemalsuan ijazah sebagaimana dijelaskan, bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai surat otentik yang dibuat secara melawan hukum dan keseluruhan isinya bertentangan dengan kebenaran, maka Pasal 263 ayat 1 KUHP cukup relevan untuk dijatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, meski tidak penting apakah dengan pemalsuan itu diubah secara keseluruhan atau sebagian, dalam Pasal ini jelas disebutkan bahwa pelaku memiliki otoritas ataupun menyuruh untuk mengubah/ memalsukan dapat dijerat.

2. Pemalsuan Surat yang Diperberat (Pasal 264)

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut:

1. Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.¹⁷

Hal yang berbeda dengan Pasal sebelumnya yakni pemalsuan surat yang diperberat dalam Pasal 264 KUHP terletak pada faktor macamnya surat yang mencakup kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya, dengan kata lain surat-surat yang digolongkan sebagai surat yang berharga dan memiliki nilai mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada surat-surat biasa atau surat lainnya, kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. Maka sudah selayaknya hal demikian diperberat hukumannya sebab membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar.

Sedangkan ijazah tergolong surat berharga yang memuat keterangan kelulusan, sebab setiap orang yang ingin memiliki ijazah tersebut haruslah mengikuti prosedur pembelajaran bertahun-tahun atau prosedur lainnya yang diatur dalam undang-undang, maka Pasal 264 KUHP yang memuat pemberatan dari Pasal sebelumnya juga dapat dikenakan terhadap pelaku oknum calon anggota DPRD.

Sebagian bentuk yang spesialis (*lex specialis derogat legi generalis*) undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memuat ketentuan pidana tentang pemalsuan ijazah yang diatur mengenai jalur jenjang dan jenis pendidikannya, pada bab VI Bagian keempat mengenai pendidikan Tinggi dan Bab XX yaitu terdapat pada Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 70.

Namun Penulis akan membahas Pasal 69 ayat (1) yang memuat unsur sebagai berikut: “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”

Berbeda dengan Pasal 263 KUHP yang masih mengatur secara universal terhadap pengertian surat ataupun akta yang dipalsukan, Pasal 69 ayat (1) lebih konkrit dengan menyebutkan bahwa terdapat lima objek tindak pidana, ijazah, sertifikat kompetensi, gelar

¹⁷ *Ibid*, h. 102.

akademik, vokasi yang kesemuanya palsu. Dan pidana yang termuat berdasarkan Pasal 69 ayat (1) adalah subjek hukum yang menggunakan obyek palsu tersebut. sedangkan pelaku yang membuat ijazah palsu tersebut tidak bisa dijerat Pasal ini, namun dapat dijerat dengan Pasal lainnya. Kelemahan dari Pasal tersebut meski memuat objek yang dipalsukan namun tidak mengakomodir untuk apa ijazah itu dipalsukan, oleh sebab itu untuk anggota DPRD yang melakukan perbuatan pemalsuan ijazah dengan maksud untuk mendaftarkan diri sebagai calon lebih relevan Pasal 520 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi intisari daripada penulisan ini, Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Dampak terjadinya pemalsuan ijazah bagi calon DPRD ialah terdapat dua faktor diantaranya, internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dominan merugikan oknum calon DPRD itu sendiri yakni menurunnya kepercayaan masyarakat terhadapnya, sedangkan faktor eksternal ialah menyebabkan kepercayaan publik menurun terhadap lembaga pendidikan akibat terjadi.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan ijazah oleh oknum calon DPRD dapat dilihat dari saat pelaku telah mendaftar sebagai bakal calon hingga ditetapkan secara sah menjadi calon, dilihat dari ini maka dapat disimpulkan bahwa *mens rea* telah mutlak terbukti jika unsur-unsur pemalsuan yang ada pada Pasal 520 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah nyata terbukti.
3. Sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan ijazah terdapat di KUHP yakni Pasal 263 dan Pasal 264 keduanya memuat pemalsuan surat/akta otentik namun dapat ditafsir sebagai pemalsuan ijazah. Dan terdapat pula pada bab VI Bagian keempat mengenai pendidikan Tinggi dan Bab XX yaitu terdapat pada Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 70.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai berikut:

1. Perlu diupayakan penanggulangan pemalsuan ijazah karena hal tersebut mengakibatkan dampak kerugian kepada masyarakat dan pemerintah, hal tersebut

haruslah direspons dengan kebijakan yang responsif untuk menekan angka pemalsuan ijazah.

2. Meski pemalsuan secara moral merupakan perbuatan yang melanggar etika, dan tercantum dalam hukum positif, sudah selayaknya pemerintah dan DPR untuk terus mensosialisasikan perbuatan yang telah dirumuskan menjadi sebuah kebijakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 224/K/Pid/2009

Buku

Adami Chazawi, (2001), *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta ,Raja Grafindo Persada.

Ade Maman Suherman dan J. Satrio, (2010), *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, Nasional Legal Reform Program Jakarta

Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

H.A.K Moch Anwar, (1986), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Jakarta, Alumni.

Hanafi, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.

Junaedi Efendi, (2016), *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group

Jurnal

Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Unisma Malang, Vol. XIX No. 36, Februari-Mei 2013

Abdul Wahid, Sunardi, *Doktrin Khilafah Sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Unisma Malang, Vol I No. 2, Juni 2018